

Nomor : 017/TDN.01/4/I/2023  
Lampiran : 1 ( Satu ) Bendel

Pare, 27 Januari 2023

Kepada Yth.  
PERBARINDO dan Media BPR  
RUMAH PERBARINDO  
Komp. Patra II No 46  
Jl. Jend Ahmad Yani  
Bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR  
Toeloengredjo Dasa Nusantara tahun 2022

Menunjuk POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata kelola bagi BPR dan SEOJK Nomor: 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK Nomor : 05/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dengan ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assessment PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara tahun 2022.

Demikian mohon diterima dengan baik.

Hormat kami,  
PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

  
  
Jasn  
Direktur

PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA

# LAPORAN

# 2022

PENERAPAN  
TATA KELOLA

📍 Jalan HOS Cokroaminoto No 88, Pare, Kediri  
☎ (0354) 391877  
📠 (0354) 394127

Telah disesuaikan dengan  
**SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020**

## BAB I PENJELASAN UMUM

### A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

### B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

- a. Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan.
- b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Agustus 2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 15 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- h. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.
- i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.49/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat.
- j. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi BPR.
- k. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Penerapan Penilaian Kembali Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
- l. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.
- m. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR
- n. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR
- o. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang penilaian kemampuan dan kepatutan bagi calon Pemegang Saham Pengendali, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris Bank.
- p. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.41/SEOJK.03/2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang



Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat

- q. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR
- r. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara beserta perubahan-perubahannya.
- s. Peraturan-peraturan lainnya yang relevan dan terkini

### C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

### D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA

#### 1. Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)..

#### 2. Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system.

#### 3. Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

#### 4. Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

#### 5. Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

### E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku.

## BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

### A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

#### 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: Jasno
	NIK	: 3517091510710004
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Bertanggungjawab atas penyaluran dana masyarakat; Bertanggungjawab atas pelaksanaan pencapaian target RBB terkait penghimpunan dan penyaluran dana yang telah dilaporkan ke OJK; Menetapkan, memutuskan dan menyetujui jumlah plafond kredit yang dapat diberikan kepada calon nasabah dalam komite; Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan yang dilaporkan oleh audit intern; Melaporkan secara berkala perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara menyeluruh; Memantau dan mengevaluasi kinerja petugas marketing; Memantau kondisi internal dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi strategi usaha BPR.
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
<p>Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.</p> <p>Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.</p> <p>Direksi telah menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.</p> <p>Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.</p>		

#### 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: H. HARIYONO
	NIK	: 3471080101610003
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Memastikan terselenggaranya penerapan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh jenjang organisasi; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan masukan dan nasehat kepada Direktur; Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit atau pejabat

yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit intern BPR, audit eksternal hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya; Mengawasi Direksi dalam menjalankan operasional perusahaan

**Rekomendasi Kepada Direksi:**

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.  
Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional.  
Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat.  
Agar Direksi melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

**3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)**

**a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite**

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

**b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite**

No	Nama	NIK	Keahlian	Komite			Pihak Independen
				Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-	-



c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Program Kerja : -
	Realisasi : -
	Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	Jasno	3517091510710004	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Jasno	3517091510710004		PT BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA	-
2	Jasno	3517091510710004		PT BPRS MARGI RIZKI BAHAGIA	-
3	Jasno	3517091510710004		PT BPR LUMBUNG ARTHA MUNTILANINDO	-
4	Jasno	3517091510710004		PT BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG	-

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Jasno	3517091510710004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR**

No	Nama Anggota Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Jasno	3517091510710004	tidak ada	tidak ada	tidak ada

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

**1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. HARIYONO	3471080101610003	-	-

**2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	H. HARIYONO	3471080101610003		PT BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA	-
2	H. HARIYONO	3471080101610003		PT BPRS MARGI RIZKI BAHAGIA	-
3	H. HARIYONO	3471080101610003		PT BPR LUMBUNG ARTHA MUNTILANINDO	-
4	H. HARIYONO	3471080101610003		PT BPR ARTHA BERKAH CEMERLANG	-

**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

**1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR**

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. HARIYONO	3471080101610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada



2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	H. HARIYONO	3471080101610003	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	1	149.100.000	1	87.000.000
2	Tunjangan	1	0	1	0
3	Tantiem	1	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	1	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	1	0	1	0
Total			149.100.000		87.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak ada fasilitas	Tidak ada fasilitas
2	Transportasi	Fasilitas kendaraan roda 4	Tidak ada fasilitas
3	Asuransi Kesehatan	BPJS Kesehatan	Tidak ada fasilitas
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada fasilitas lainnya	Tidak ada fasilitas lainnya

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,06	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,71	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,49	1

## H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

### 1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2022-1-3	8	Evaluasi Kinerja dan pencapaian RBB tahun 2021 serta membahas Rencana Bisnis BPR tahun 2022
2	2022-4-5	4	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR triwulan pertama dan penilaian terhadap kinerja prosedur perkreditan
3	2022-7-11	12	Penanganan Kredit bermasalah, yang terdiri dari Restrukturisasi Kredit, pengambilalihan agunan, hapus buku, dan/atau hapus tagih

### 2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Flisik	Telekonferensi	
1	H. HARIYONO	3471080101610003	3	0	100,00%

## I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022	2021	2022
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satu-satu)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

## K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2022-10-28	Sosial	Iuran anggota Perbarindo DPK Kediri untuk korban bencana	Perbarindo	500.000

**M. PENUTUP**

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara, Terima Kasih.

Pare, Kediri, 25 Januari 2023

Persetujuan Pengurus PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

  
**H. HARIYONO**  
Komisaris Utama

  
  
**Masno**  
Direktur



## I. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang Dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	0,200	Cukup Baik	2,73
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	0,150	Cukup Baik	3,01
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE	0,000	-	0,00
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	0,100	Cukup Baik	3,00
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	0,100	Cukup Baik	3,05
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	0,100	Cukup Baik	3,05
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN	0,025	Cukup Baik	3,00
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO	0,100	Cukup Baik	2,90
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT	0,075	Cukup Baik	2,75
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS	0,075	Cukup Baik	3,00
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN	0,075	Cukup Baik	3,00

## II. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

1. Struktur Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian sudah lengkap
2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap
3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap

Pare, Kediri, 24 Januari 2023  
Pengurus PT. BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara

  
**H. HARIYONO**  
Komisaris Utama



**KERTAS KERJA FAKTOR 1**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	<b>STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan				X		Direksi untuk BPR TDN saat ini masih 1 (satu), dalam rangka proses pemenuhan Direksi YMFK
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR			X			Direktur yang ada saat ini berdomisili di Jombang
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)		X				Sesuai dengan Ketentuan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.		X				Sesuai dengan Ketentuan
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud			X			Direktur yang ada saat ini tidak menggunakan jasa profesional untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya		X				Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	6	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		16					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 6		2,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,34					
B	<b>PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas			X			Sesuai dengan ketentuan
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain			X			Sesuai dengan ketentuan
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris			X			Sesuai dengan ketentuan
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan			X			Sesuai dengan ketentuan

	pendapat.						
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X				Sesuai dengan ketentuan
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu			X			Dalam peningkatan pengetahuan perbankan dibutuhkan pelatihan/pendidikan secara berkelanjutan
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian			X			Sesuai dengan ketentuan
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	21	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		23					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,88					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,15					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS		X				Direktur telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan RUPS
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian			X			Direktur perlu meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan perkembangan BPR
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi			X			Dalam hal ini perlu dilakukan kedisiplinan dalam mendokumentasikan kegiatan rapat Direktur
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		X				Direktur selalu meningkatkan kualitas kemampuannya dalam rangka peningkatan kinerja BPR yaitu mengikuti pelatihan dan pertemuan-pertemuan dengan Instansi atau BPR lain untuk mendapatkan informasi yang membangun
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		X				Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 5		2,40					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,24					





**PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA**

**Jalan HOS Cokroaminoto No 88**

Pare, Kediri

Telp. (0354) 391877, Fax. (0354) 394127

---

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,73</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,546</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 2**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	<b>STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang					X	Sampai dengan pelaporan ini posisi untuk pengurus Komisari masih 1 (satu)
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan				X		Jumlah Dewan Komisaris memang tidak melampaui batas jumlah anggota Direksi namun hal ini tidak sesuai dengan Ketentuan Kebijakan Tata Kelola
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan		X				Sesuai dengan ketentuan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR			X			Komisaris BPR TDN saat ini berdomisili di Daerah Istimewa Yogyakarta
5	BPR memiliki Komisaris Independen		X				Saat ini posisi Dewan Komisaris sudah menjalankan fungsinya secara Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat			X			Sesuai dengan ketentuan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum			X			Sesuai dengan ketentuan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		X				Sesuai dengan ketentuan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	12	4	5	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		27					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 9		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B	<b>PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap			X			Komisaris sudah

	pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.							melaksanakan pengawasan, namun perlu ditingkatkan untuk lebih intens
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		X					Sesuai dengan ketentuan
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		X					Sesuai dengan ketentuan
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan			X				Hasil dari temuan audit intern lebih diperhatikan untuk pemenuhan dari hasil tindak lanjutnya
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris				X			Saat ini memang sudah dilakukan rapat secara baik namun karena posisi Dewan komisaris masih belum terpenuhi sehingga untuk rapat belum dilaksanakan secara rutin
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat				X			Komisaris sudah melakukan kegiatan hasil rapat dengan baik, namun karena masih belum terpenuhi posisi Komisaris sehingga hasil putusan rapat kurang maksimal
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS		X					Sesuai dengan ketentuan
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi			X				Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	9	8	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		23						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 8		2,88						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,15						
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>								
1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris			X				Sudah dilakukan rapat Komisaris bersama Direktur namun perlu ditingkatkan untuk pendokumentasian hasil rapat
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0		
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3						
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		3,00						
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30						





**PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA**

**Jalan HOS Cokroaminoto No 88**

Pare, Kediri

Telp. (0354) 391877, Fax. (0354) 394127

---

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,95</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,443</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 3**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		0,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 3		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		0,00					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		0					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,00					



**PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA**

**Jalan HOS Cokroaminoto No 88**

Pare, Kediri

Telp. (0354) 391877, Fax. (0354) 394127

---

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,000</b>



**KERTAS KERJA FAKTOR 4**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat			X			BPR sudah memiliki prosedur benturan kepentingan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut			X			Sesuai dengan Ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik			X			Sesuai dengan Ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,300</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 5**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana				X		Untuk Direksi YMFK masih dalam proses RUPS dan telah lulus pkk OJK
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan				X		Untuk Direksi YMFK masih dalam proses RUPS dan telah lulus pkk OJK
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		X				Fungsi kepatuhan sudah berjalan sesuai dengan fungsinya
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan		X				Sesuai dengan ketentuan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		X				Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	6	0	8	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		14					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		2,80					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,40					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya				X		Untuk Direksi YMFK masih dalam proses RUPS dan telah lulus pkk OJK
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini				X		Untuk Direksi YMFK masih dalam proses RUPS dan telah lulus pkk OJK
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan				X		Untuk Direksi YMFK masih dalam proses RUPS dan telah lulus pkk OJK
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		X				Sesuai dengan ketentuan
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa		X				Sesuai dengan ketentuan

	Keuangan dan peraturan perundang-undangan						
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	4	0	12	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	16					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 5	3,20					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%	1,28					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan			X			Masih perlu ditingkatkan ketentuan yang ada di BPR
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris				X		Untuk Direksi YMKF masih dalam proses RUPS dan telah lulus pkk OJK
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan				X		Untuk Direksi YMKF masih dalam proses RUPS dan telah lulus pkk OJK
	HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	0	3	8	0	
	TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	11					
	PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 3	3,67					
	NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,37					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>3,05</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,305</b>



**KERTAS KERJA FAKTOR 6**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	<b>STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern			X			Sesuai dengan ketentuan
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris			X			Pedoman yang ada selalu diperbarui sesuai dengan ketentuan yang ada
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)			X			Sesuai dengan ketentuan
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama			X			Saat ini Audit Intern masih bertanggung jawab kepada Direktur dan Komisaris
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	15	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 5		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B	<b>PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat			X			Saat ini Audit Intern masih bertanggung jawab kepada Direktur dan Komisaris
2	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X				BPR belum melakukan kajian ulang untuk pemantauan SOP Audit
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit			X			Sesuai dengan ketentuan
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern			X			Masih perlu ditingkatkan kualitas SDM secara berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		11					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		2,75					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,10					

KELOLA (P): 40%						
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)					
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan			X		Sesuai dengan ketentuan
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X		Sesuai dengan ketentuan
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X			Sesuai dengan ketentuan
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	4	6	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		10				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 4		2,50				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,25				

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,85</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,285</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 7**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris			X			Sesuai dengan ketentuan
2	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk			X			Sesuai dengan ketentuan
2	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					



**PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA**

**Jalan HOS Cokroaminoto No 88**

Pare, Kediri

Telp. (0354) 391877, Fax. (0354) 394127

---

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,075</b>



**KERTAS KERJA FAKTOR 8**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko		X				BPR sudah memiliki PE Manrisk sesuai dengan kompetensi
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko			X			BPR sudah memiliki SOP Manrisk tetapi perlu dilakukan pembaruan
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan			X			BPR sudah memiliki ketentuan tetapi belum secara keseluruhan dilaksanakan dalam kegiatan BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		2,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,34					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi			X			Sesuai dengan ketentuan
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris			X			Sesuai dengan ketentuan
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material			X			Masih perlu dilakukan peningkatan dalam melakukan pemantauan profil risiko sehingga dapat memperbaiki kuantitatif dan kualitas penilaian profil risiko
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh			X			Sesuai dengan Ketentuan
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan				X		Karena hasil dari penilaian terhadap profil risiko masih cukup tinggi
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh			X			Masih dibutuhkan peningkatan terhadap sistem yang ada di BPR
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko			X			Sesuai dengan ketentuan

HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	18	4	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		22					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 7		3,14					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,26					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan Ketentuan
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan Ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>		<b>2,90</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>		<b>0,290</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 9**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
A	STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)						
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR			X			BPR sudah memiliki SK terkait dengan ketentuan BMPK dan BMPD sesuai dengan ketentuan POJK yang terbaru
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
B	PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)						
1	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan		X				Sesuai dengan ketentuan
2	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		2,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,00					
C	HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)						
1	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Dalam pemberian kredit kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan BMPK
2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		X				Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		5					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		2,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,25					



**PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA**

**Jalan HOS Cokroaminoto No 88**

Pare, Kediri

Telp. (0354) 391877, Fax. (0354) 394127

---

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>2,75</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,206</b>



**KERTAS KERJA FAKTOR 10**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 10 - RENCANA BISNIS**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR			X			Sesuai dengan ketentuan
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Masih perlu dilakukan pemantauan terhadap Realisasi Bisnis Bank
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	9	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		9					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 3		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko			X			BPR telah menyusun RBB namun realisasi belum terealisasi dengan baik
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR			X			Komisaris melakukan pengawasan secara kontinue terhadap RBB BPR, namun perlu dilakukan peningkatan terhadap pelaksanaan terealisasinya RBB secara berkelanjutan sehingga yang menjadi tujuan BPR tercapai
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			X			Sesuai dengan ketentuan, termasuk alasan tidak tercapainya realisasi RBB juga disampaikan pada OJK

HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 1	3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%	0,30					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,225</b>

**KERTAS KERJA FAKTOR 11**

NAMA BPR : PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2022

**Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			X			Sudah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan cukup baik
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	3	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		3					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S): 1		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S): 50%		1,50					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan ketentuan, namun perlu dilakukan pemeriksaan dual control dari hasil laporan publikasi agar tidak salah dalam menyampaikan pelaporan
2	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan ketentuan
3	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan ketentuan
4	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	12	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		12					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P): 4		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P): 40%		1,20					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			X			Sesuai dengan ketentuan
2	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan			X			Sesuai dengan

	laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.						ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	0	6	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H): 2		3,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H): 10%		0,30					

<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>	<b>3,00</b>
<b>TOTAL PENILAIAN 11 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 11 SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>0,225</b>



**TABULASI SELF ASSESSMENT PT. BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA  
SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan				Nilai Bobot Faktor
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	
1	Faktor 1 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI (20.0%)	1,34	1,15	0,24	2,73	0,546
2	Faktor 2 - PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS (15.0%)	1,50	1,15	0,30	2,95	0,443
3	Faktor 3 - KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE (0.0%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
4	Faktor 4 - PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN (10.0%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,300
5	Faktor 5 - PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN (10.0%)	1,40	1,28	0,37	3,05	0,305
6	Faktor 6 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN (10.0%)	1,50	1,10	0,25	2,85	0,285
7	Faktor 7 - PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (2.5%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,075
8	Faktor 8 - PENERAPAN MANAJEMEN RESIKO (10.0%)	1,34	1,26	0,30	2,90	0,290
9	Faktor 9 - BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (7.5%)	1,50	1,00	0,25	2,75	0,206
10	Faktor 10 - RENCANA BISNIS (7.5%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,225
11	Faktor 11 - TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN (7.5%)	1,50	1,20	0,30	3,00	0,225
<b>NILAI KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>						<b>2,9</b>

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 <= Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 <= Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 <= Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 <= Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 <= Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

PREDIKAT KOMPOSIT SESUDAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

**Cukup Baik**

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505065-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601132-26012023112641

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

bpr\_tdn1@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-26 11:26:41



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.